



PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) TAHUN 2024



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanyalah untuk Allah SWT, Robb pendidik kalbu manusia. Shalawat serta salam terlimpah ruah kepada Nabi penyempurna akhlak pembawa rahmat bagi sekalian alam Muhammad SAW. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Rencana kerja ini disusun sebagai sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan rencana kerja ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang yakni hal tersebut merupakan pertolongan Allah SWT. Untuk itu Jazakumullahu Khoiron Katsiron penulis ucapkan Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan rencana kerja ini. Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan rencana kerja ini. Akhir kata semoga amal baik semua pihak terlibat dalam penyusunan rencana kerja ini mendapat balasan yang banyak dari Allah SWT. Aamiin.

Tasikmalaya, Agustus 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



D. H. HERU SUHARTO, M.M.Kes.
Bina Utama Muda
NIP. 19670709 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN	
2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.....	9
2.2 Analisis Kinerja Program/Kegiatan Dinas Kesehatan	14
2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran.....	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan Provinsi Jawa barat	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas kesehatan.....	28
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya	9
Tabel 3.1 Target Tahun 2025 dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	24
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2021	25
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah	29
Tabel 3.4 Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan	30
Tabel 3.5 Tujuan Dinas Kesehatan	31
Tabel 3.6 sasaran Dinas kesehatan	31

DAFTAR GAMBAR

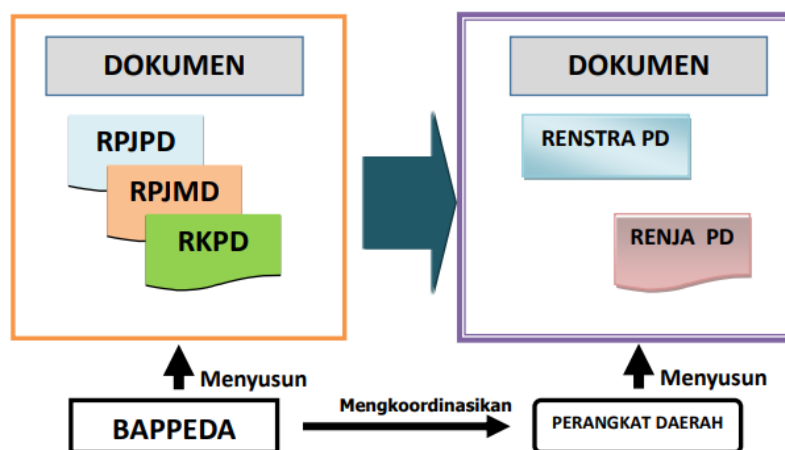
Gambar 1 Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	1
Gambar 2 Keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	2
Gambar 3 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	5



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.



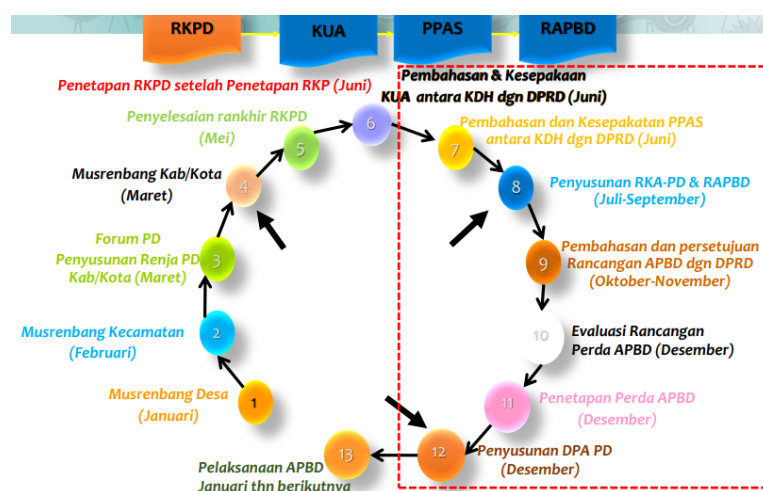
Gambar 1. Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Sebagaimana Gambar 1. di atas Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan terkait urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kedua dokumen ini disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Renstra PD dan Renja PD harus saling terkait. Renja PD merupakan penjabaran dari perencanaan yang sudah tertuang dalam Renstra PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

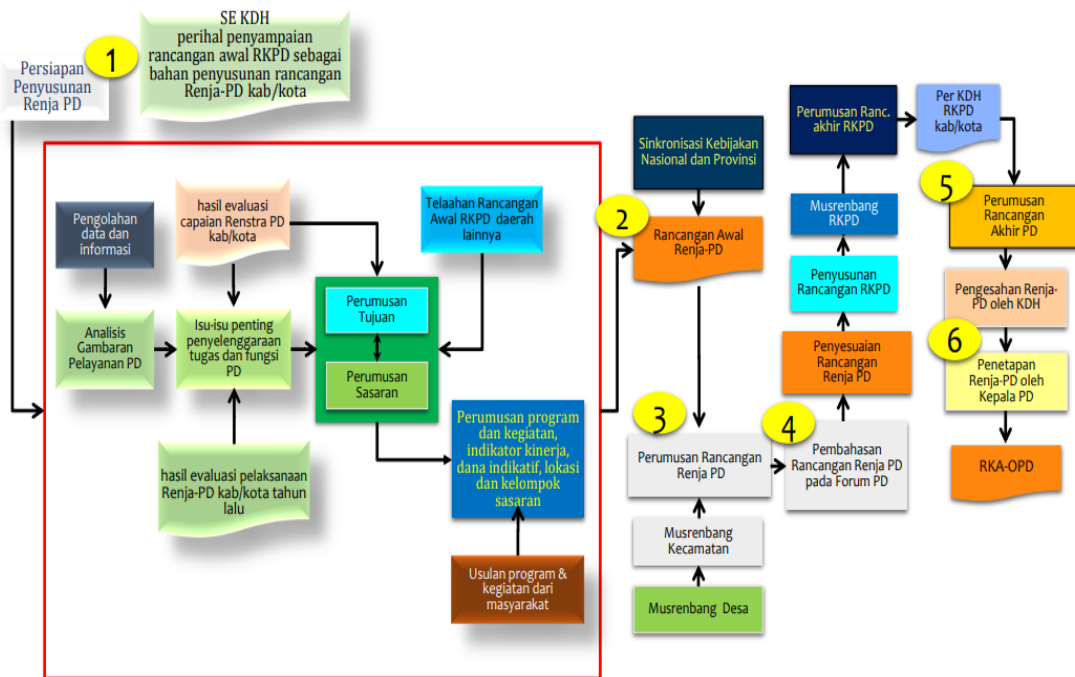
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 sudah berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026 dengan mempertimbangkan arahan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Adapun keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini :



Gambar 2. Keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini :



Gambar 3. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPd berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dalam rangka mewujudkan keseragaman tahapan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat tepat waktu.

Tahapan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan 2024 adalah sebagai berikut:



1. Persiapan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Perumusan rancangan akhir;
5. Penetapan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
- x. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan



Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan perubahan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024.
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

BAB IV. Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, terangkum dalam Tabel 2.1 di bawah ini :



**Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		
			Target 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II – 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Urusan Kesehatan				
	Bidang Kesehatan Masyarakat				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3	112*	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	2	13.694*	
		Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup)	85	18*	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	1	4*	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	3	102*	
		Prosentase Keluarga Sehat	76	20	26,32
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	67,92	67,92
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan persalinan sesuai standar	100	87,02	87,02



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		
			Target 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II – 2024	Tingkat Realisasi (%)
		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	87,20	87,20
		Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	91,68	91,68
	Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit	Persentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	60,46	60,46
		Persentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	75,89	75,89
		Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	80,95	80,95
	Bidang Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk (BB/TB)	0,65	0,32	49,2
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100
	Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	65,79	65,79
		Persentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	50,08	50,08



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		
			Target 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II – 2024	Tingkat Realisasi (%)
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	100	77,65	77,65
		Persentase penderita Diabet Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	70,71	70,71
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	100	75,75	20,86
	Bidang Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif	80	69,23	86,5
		Persentase kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	57,2 70	45,79	65,4
		Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100 % (b candra)	100	0	0
	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	81	81,37	100,46
		Jumlah penduduk mendapat pelayanan kesehatan rujukan	5.420	2.602	48,01
	Bidang Pelayanan Kesehatan	Rasio Sarana Kesehatan Per Satuan Penduduk (B Anih)	0/00	0,13	0,13
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/45.078	1/49.630	90,83



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		
			Target 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II – 2024	Tingkat Realisasi (%)
		Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk (1 : 10.000)	1/11.781	1/12.394	95,06
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1 : 100.000)	4,11	1/979.111	11,34
		Rasio Poliklinik per satuan penduduk	1/28.605	1/32.637	87,65
		Pembangunan Rumah Sakit Type D/RS Pratama Cikatomas	1	1	100
		Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal	3	3	100
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi sesuai standar nasional	100	100	100
	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	100	91,6	91,6
		Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (1 : 5000)	0,09	0,082	60,74

Keterangan : *) Angka Absolut



Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa capaian terhadap Target Capaian Indikator Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ada yang sudah mencapai 100% bahkan sudah melebihi 100%, tetapi untuk beberapa Indikator masih belum mencapai 100%.

Untuk 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan, 11 indikator capaiannya di atas 50%, yaitu :

1. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2. Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan persalinan sesuai standar.
3. Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
4. Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5. Persentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6. Persentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7. Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
9. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar
10. Persentase penderita Diabet Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Sedangkan untuk 1 Indikator capaiannya masih di bawah 60%, yaitu:
Persentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.



2.2 Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

2.2.1 Penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :

- Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan).
- Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000).
- Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk.
- Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

a) Kegiatan UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :

- Presentase pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar.

Adapun Faktor belum tercapainya target yaitu :

- 1) Perencanaan Tahun 2024 harga satuan obat per item-nya jauh di bawah harga e-katalog/harga pasar.
- 2) Adanya kenaikan Pajak PPn dari 10 menjadi 11%.

b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :

- Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian Setandar Pelayanan Minimal (SPM)
- Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Adapun faktor-faktor belum tercapainya target diantaranya :

- 1) Belum optimalnya pelayanan ANC sesuai standar.



- 2) Sarana prasarana penunjang pelayanan ANC Terpadu di FKTP belum sesuai standar.
- 3) Akses ke faskes masih menjadi kendala.
- 4) Masih adanya persalinan oleh non nakes (paraji) disebabkan Kemitraan paraji masih belum optimal.
- 5) Promosi kesehatan tentang persalinan di Fasilitas kesehatan masih belum optimal.
- 6) Kualitas pelayanan pada bayi baru lahir belum sesuai standar dengan menggunakan MTBM.
- 7) Kesadaran ibu untuk pemeriksaan bayi baru lahir oleh petugas masih kurang.
- 8) Indikator standar pelayanan kesehatan pada Balita cukup banyak dan rumit.
- 9) Sarana dan alat pelayanan kesehatan pada balita khususnya Deteksi SDIDTK belum memenuhi jumlah dan standar pelayanan.
- 10) Dukungan lintas sektor masih kurang.
- 11) Pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada Balita masih perlu ditingkatkan.
- 12) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) sebagai pelaksana teknis dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar.
- 13) Keterbatasan standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa dalam pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar.
- 14) Belum optimalnya koordinasi lintas program.
- 15) Belum optimalnya penerapan TRIAS UKS/M sebagai wadah pelayanan kesehatan pada Anak Usia Sekolah.
- 16) Anggaran belum memadai karena skrining/ deteksi dini faktor resiko PTM pada usia produktif banyak jenisnya.



- 17) Belum memaksimalkan klinik swasta baik dalam case finding maupun penatalaksanaan deteksi dini kasus faktor resiko terutama penyakit tidak menular.
- 18) Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal terutama dengan sektor pendidikan baik pemerintah maupun swasta (lembaga pendidikan formal maupun non formal) untuk menjaring usia sekolah dan remaja.
- 19) Pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal terutama dalam pemberdayaan UKBM.
- 20) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
- 21) Keterbatasan standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa dalam pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada lansia,
- 22) Kurangnya dukungan keluarga dalam pemeriksaan pada lansia
- 23) Lansia yang masih bekerja sulit untuk menyesuaikan jadwal pelayanan posyandu lansia.
- 24) Hotspot kelompok resiko masih belum diketahui sehingga penjangkauan suspect sulit dilakukan.
- 25) WPS (wanita penjaja seks) tidak terkoordinir, sehingga sulit terpantau.
- 26) Ibu hamil, suspek Hepatitis, suspek TB belum 100 % diperiksa karena belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- 27) Tidak ada anggaran untuk melakukan mobile VCT (mencari sasaran secara aktif)
- 28) Kurangnya anggaran untuk penjangkauan tersangka ODHIV



- 29) Kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran di kelompok resiko tentang pentingnya pemeriksaan HIV
- 30) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
- 31) Belum ada tenaga kader terlatih dalam pelaksanaan skrining factor resiko Hipertensi dan Diabetes Melitus.
- 32) Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal untuk menggerakkan masyarakat agar datang ke Posbindu ataupun ke pasyankes untuk cek kesehatan.
- 33) Menolak untuk diobati.
- 34) Memilih pengobatan alternative.
- 35) Setelah pengobatan ke medis tidak ada perubahan karena tidak disiplin dalam mengkonsumsi obat.
- 36) Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat sekitar.
- 37) Belum semua kasus dikunjungi karena keterbatasan SDM (Programer yang merangkap tugas).
- 38) Keluarga sudah bosan mengurus pasien karena penyembuhan ODGJ memerlukan waktu lama.
- 39) Pelayanan tidak selalu kondusif akibat pasien yang mengamuk, meresahkan dan membahayakan.
- 40) Tidak ada penambahan bangunan baru baik puskesmas ataupun puskesmas sehingga rasio fasyankes masih sama capaian dengan tahun lalu.

1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dengan indikator :



- Jumlah pelaku usaha penerima sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) tempat pengelolaan makanan (TPM)
- b. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, dengan indikator :
 - Jumlah penjual makanan jajanan, Sentra Makanan jajanan dan pelaku usaha makanan minuman yang mendapatkan pembinaan.

Dari kegiatan tersebut realisasinya belum sesuai target. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu :

Pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme dan persyaratan perijinan pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan OSS-RBA masih rendah sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke OSS online. Dan yang mendaftar tidak melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Jumlah 9 jenis ketenagaan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dari kegiatan tersebut realisasinya belum sesuai target dikarenakan untuk jenis tenaga kesehatan Dokter Gigi kurang peminat.

3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :



- Jumlah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Jumlah UKBM yang mengikuti Bintek dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM.

Dari indikator tersebut realisasinya belum sesuai target, dikarenakan dari masing-masing desa mengeluarkan regulasi pembudayaan germas dan terkait UKBM pengelola promkes di puskesmas yang berubah-ubah sehingga pemahaman terkait UKBM belum maksimal.

2.2.2 Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator:
 - Persentase Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi sesuai standar nasional.
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan indikator :
 - Persentase Industri Pangan Skala Rumah Tangga terdaftar yang mengikuti pelatihan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP).

Dari ke dua indikator tersebut realisasi sesuai dengan target semua dimana target 100% dan realisasi 100%. Adapun faktor-faktor tercapainya target diantaranya :

- 1) Pada tahun 2019 terakhir melaksanakan akreditasi sebanyak 13 Puskesmas karena yang 27 Puskesmas sebelumnya sudah



melaksanakan akreditasi, pada tahun 2021 terdapat Puskesmas yang masa berlakunya habis sehingga harus dilaksanakan survei reakreditasi, tetapi karena terjadi KLB yaitu pandemic covid-19 maka hanya dapat dilaksanakan proses pendampingan pasca akreditasi dan workshop pendukung saja tidak dengan survei akreditasinya, tetapi berdasarkan surat edaran kementerian kesehatan untuk Puskesmas yang masa berlakunya habis pada tahun 2021, maka secara otomatis di perpanjang hingga masa pandemi hilang. Penundaan survei Re-Akreditasi Puskesmas Tahun 2021, atas dasar Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/455/2020, tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk tahun 2022 masih sama seperti tahun 2021 ada penundaan survei Re-Akreditasi Puskesmas atas dasar Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/455/2020, tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Kondisi tersebut di atas, maka Seluruh Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya sudah terakreditasi semuanya.

- 2) Sesuai target karena dengan izin bpom kita merevisi/merubah pos anggaran uang transport dan uang saku peserta untuk menambah jumlah angkatan sehingga jumlah cakupan sasaran bertambah.

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :



a. Pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM tingkat Kab/Kota, dengan indikator :

- Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi

b. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota, dengan indikator :

- Persentase izin praktek tenaga kesehatan yang di keluarkan.

Dari dua indikator tersebut realisasi sesuai dengan target semua dimana target 100% dan realisasi 100%. Adapun faktor-faktor tercapainya target diantaranya :

- 1) Semua ASN yang akan naik jenjang ataupun alih kategori melaksanakan Uji Kompetensi yang di selenggarakan instansi di luar Daerah.
- 2) Setiap pemohon yang mengajukan izin praktek akan di verifikasi oleh Dinas Kesehatan sesuai usulannya sehingga para pemohon yang telah lolos verifikasinya mendapat SIP (Surat Izin Praktek).

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, dengan indikator :

- Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah..
- Nilai IKM Perangkat Daerah.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator:
 - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan.
 - c. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan indikator :



- Persentase rumah sakit daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD.
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - Cakupan pelayanan administrasi umum.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator :
 - Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator :
 - Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun tercapainya target dikarenakan kegiatan di laksanakan sesuai perencanaan sehingga semua kegiatan yang ada di kesekretariatan dapat terlaksana sesuai target yaitu 100%.

2.2.3 Penyebab kinerja program/kegiatan melebihi target yang telah ditetapkan

1. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, dengan indikator :
 - Persentase industri rumah tangga terdaftar yang diperiksa Post Market pada Produksi dan Produk Makanan MinumanAdapun faktor yang mendukung tercapainya target diantaranya :
 - a) Alokasi dan target sasaran yang ditetapkan tidak terlalu besar sehingga masih dalam kapasitas pelaksanaan unit kerja mamin.
2. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan indikator:



- Jumlah Sarana Kefamasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)), yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target diantaranya :

- a) Pada saat penyusunan target pada dokumen perencanaan belum mengakomodir semua anggaran BPOM, sedangkan realisasi pada tahun 2024 Kabuptaen Tasikmalaya mendapatkan anggaran dari BPOM sehingga realisasi melebihi target.

2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

1. Akan memperkuat advokasi Dinas Kesehatan ke Kepala Daerah, TAPD, lembaga legislatif serta pemangku kepentingan lainnya terkait perencanaan dan penganggaran untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Tim Perencana akan mengkaji dan menyusun program prioritas dengan memperhatikan target maupun capaian indikator dan selaras dengan kebijakan daerah, provinsi maupun pusat.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Secara nasional, indikator kinerja didasarkan pada pencapaian SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Tahun 2024 dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023
Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Jenis Pelayanan/Indikator Kinerja	Target Nasional (%)	Pencapaian Tahun 2023 (%)	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	99.04	100
2.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	94.40	100
3.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	98.30	100
4.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	63.2	100
5.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	90.17	100
6.	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	63.23	100
7.	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	87.40	100
8.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	81.79	100
9.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	83.40	100



No.	Jenis Pelayanan/Indikator Kinerja	Target Nasional (%)	Pencapaian Tahun 2023 (%)	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
10.	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	87,23	100
11.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100
12.	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	70,00	100

Kemudian dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dimana untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 yang selaras dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah dan untuk Dinas Kesehatan tentu saja sesuai dengan urusan kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2021

No.	Kinerja	Indikator	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1/5.758
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	100%



2	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%
3	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	18*



		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	7
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18%
		Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	6%
		Insidensi TB	3.788
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	18.652 orang
		Treatment coverage pada pasien TB	91%
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	90%
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	10%
		Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan	40 Puskesmas



		Upaya Berhenti Merokok (UBM)	
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	20%
4	Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan pedagang besar farmasi (PBF) cabang, sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	50%

Kemudian selain telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Dinas Kesehatan pun melakukan telaahan terhadap Kebijakan Provinsi yaitu telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, dimana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memprioritaskan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dan mendukung pencapaian penanganan stunting.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan digunakan



sebagai pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok atau organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024 memiliki target pencapaian indikator kinerja utama sesuai dengan indikator pada RPJMD dan Renstra 2021-2026.

**Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026**

Visi RPJMD	“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”		
Misi 1 RPJMD	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah		
Tujuan RPJMD	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya		
Sasaran RPJMD	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1.1.1. Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai standar
			1.1.1.2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
			1.1.1.3. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
	1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.2.1. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesehatan	1.2.1.1. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah bidang kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan.



Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 dalam Urusan Kesehatan memiliki Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah, dimana Prioritas Pembangunan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan Sasaran Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Daerahnya adalah Indeks Kesehatan. Selain itu, Prioritas Pembangunan Daerah ini diharapkan juga dapat mewujudkan Sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat dengan Indikatornya adalah Angka Usia Harapan Hidup dan mewujudkan Sasaran Perangkat Daerah berikutnya yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikatornya adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.



Tabel 3.5
Tujuan Dinas Kesehatan

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (poin)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	83

Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 disebutkan bahwa Tujuan Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikatornya adalah Indeks Kesehatan dan target kinerja pada tahun 2024 adalah 83 point.

Tabel 3.6
Sasaran Dinas Kesehatan

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,73
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,1

Kemudian Sasaran Dinas Kesehatan seperti yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 adalah Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat dengan Indikatornya adalah Angka Usia Harapan Hidup dan target kinerja pada tahun 2024 adalah 69,73. Sasaran berikutnya adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikatornya adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan target kinerja pada tahun 2024 adalah 50,1.



Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.7 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.



Tabel 3.7
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No								Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasion al	Daerah					
1	2							3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								Dinas Kesehatan				355.695.252.663	307.712.499.805	346.542.695.978							353.700.264.555		
	1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				355.695.252.663	307.712.499.805	346.542.695.978							353.700.264.555		
	1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				355.695.252.663	307.712.499.805	346.542.695.978							353.700.264.555		
8	1	02			01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	78,8 Poin	78,8 Poin	139.127.123.992	167.259.871.809	170.304.891.401						78,8 Poin	190.679.575.334		
									Nilai IKM Perangkat Daerah	90 Poin	90 Poin									90 Poin			
	1	02	01			2.01		Perencanaan, Penganggar	Jumlah Dokumen Perencana	12 Dokumen	12 Dokumen	146.632.500	160.000.000	160.000.000			-	Peningkatan Pelayanan	-	12 Dokumen	170.000.000	DINAS KESEHATAN	



							an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								n Kesehata n Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting					
1	0 2	0 1		2 . 0 0 1 1	0 0 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tasikmala ya, Singaparn a, Sukaasih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			100.000.000	DINAS KESEHATA N	
1	0 2	0 1		2 . 0 0 1 1	0 0 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	46.632.500	60.000.000	60.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			70.000.000	DINAS KESEHATA N	



	1	0	0		2.0	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggung gjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	129.752.781.992	163.992.584.609	163.992.584.609			-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting	-	100%	186.240.421.018	DINAS KESEHAT AN
	1	0	0		2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1863 Orang/bula n	1863 Orang/bul an	129.752.781.992	163.992.584.609	166.992.584.609	Kab. Tasikmala ya, Singaparn a, Sukaasih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			186.240.421.018	DINAS KESEHATA N
	1	0	0		2.0	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Cakupan peningkata n kapasitas ASN Dinkes	100%	100%	90.285.000	-	-			-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting	-	100%	-	DINAS KESEHAT AN



	1	0	0		2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	90.285.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	948.634.500	610.622.000	610.622.000			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	100%	1.033.491.688	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	253.371.000	120.000.000	144.227.692	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah			240.399.000	DINAS KESEHATAN

[illegible]



								Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			276.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	380.622.000	350.622.000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			330.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	5.211.863.600	-	-			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	100%	-	DINAS KESEHATAN



	1	0	0		2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		2	1		0	0		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		2	1		0	0		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Pengadaan Mebel														
		2	1		0	0		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	56.857.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Singaparna	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan			-	DINAS KESEHATAN

40



						Pemerintah an Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah								Kesehata n Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting					
1	0 2	0 1		2 . 0 8	0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	828.006.000	828.006.000	828.006.000	Kab. Tasikmala ya, Singaparn a, Sukaasih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			946.506.060	DINAS KESEHATA N
1	0 2	0 1		2 . 0 8	0 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.408.000	-	-	Kab. Tasikmala ya, Singaparn a, Sukaasih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			-	DINAS KESEHATA N



	1	0	0		2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.423.800.000	1.222.200.000	1.222.200.000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting		1.563.908.472	DINAS KESEHATAN					
	1	0	0		2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		2	1			9		Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	690.712.400	446.459.200	446.459.200			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	100%	725.248.096	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0		2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	18 Unit	18 Unit	250.000.000	178.200.000	178.200.000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan		275.000.000	DINAS KESEHATAN					



								Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									n Angka Prevalens i Stunting										
	1	02	01		2009	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	16 Unit	16 Unit	108.750.000	108.750.000	123.750.000	Kab. Tasikmala ya, Singaparn a, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			109.198.000	DINAS KESEHATA N						
	1	02	01		2009	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	40 Unit	169.962.400	129.509.200	120.281.200	Kab. Tasikmala ya, Singaparn a, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			274.900.096	DINAS KESEHATA N						
	1	02	01		200		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				



						0	0																					
						9	9			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	162.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			66.150.000	DINAS KESEHATAN					
	1	0	0			2	1	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase rumah sakit daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	100%	100%	-	-	-			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	100%	-	DINAS KESEHATAN					
										Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	100%	100%									100%							
	1	0	0			2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
						1	0																					
						0	1																					



									Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	-	-	-	Kab. Tasikmala ya, Jamanis, Semua Kel/Desa	Pendapat an dari BLUD	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting		-	DINAS KESEHATA N	
9	1	0 2		02					PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	66,7%	66,7%	212.008.027.017	136.008.054.096	171.593.230.677					66,7%	157.687.235.470	
									Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/6382 Rasio	1/6382 Rasio									1/6382 Rasio		
									Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	4,11 Rasio	4,11 Rasio									4,11 Rasio		
									Prevalensi stunting(pe ndek dan sangat	0,14	0,14									0,14		

46

47



								Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	4 Unit	10.739.277.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		20001	007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
								Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		20001	008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-	3 Unit	-	450.000.000	450.000.000	Kab. Tasikmalaya, Singaparn	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan			500.000.000	DINAS KESEHATAN



								yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemelihara an Oleh Rumah Sakit							a, Cikunten	Alokasi Umum		n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting				
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemelihara an Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000	-	-		Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			-	DINAS KESEHATA N
	1	0	0		2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas															
		2	2			0																
					0	0																
					1	9																
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemelihara an Oleh Puskesmas	4 Unit	3 Unit	10.015.350.000	3.816.022.000	3.816.022.000		Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			3.100.000.000	DINAS KESEHATA N



	1	0	0		2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
								Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Unit	24 Unit	1.400.000.000	4.525.236.000	4.525.236.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			1.540.000.000	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0		2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000	1.422.318.000	1.422.318.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			1.100.000.000	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0		2	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		



								Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	37.885.923.220	26.629.928.000	30.129.928.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			10.005.923.220	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
						0		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN



								Regional/R egional Maintainan ce Center											
	1	0	0		2	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan												
		2	2			0													
						0													
						2													
						0													
						1													
						0													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													
						0													
						2													
						1													
						2													



									berdasarka n kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkata n kapasitas pelayanan rumah sakit									Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Provinsi							
	1	0 2	0 2		2 . 0 1	0 2 3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
								Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	50 Paket	50 Paket	9.000.004.800	5.924.197.000	5.924.197.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting				14.900.000.000	DINAS KESEHATA N			



								yang disediakan												
	1	02	02		20016	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	200 Paket	200 Paket	200.000.000	123.457.000	123.457.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			220.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	100%	100%	101.522.817.758	91.806.865.096	91.806.865.096			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	100%	123.870.562.250	DINAS KESEHATAN
							Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung	100%	100%									100%		



								g ketercapai an Setandar Pelayanan Minimal (SPM)													
1	0 2	0 2		2 . 0 0 2	0 0 0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32946 Orang	32946 Orang	500.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			789.000.000	DINAS KESEHATA N	
1	0 2	0 2		2 . 0 0 2	0 0 0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31448 Orang	31448 Orang	1.000.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			1.300.000.000	DINAS KESEHATA N	

56



						0 2	0 5															
									Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292036 Orang	292036 Orang	100.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2			2 0 0 2	0 0 0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	650748 Orang	650748 Orang	150.000.000	362.906.000	387.906.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			360.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2			2 0 0 2	0 0 0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
									Jumlah Penduduk Usia Lanjut	162627 Orang	162627 Orang	100.000.000	3.030.000.000	3.030.000.000	Kab. Tasikmalaya,	Dana Transfer Umum-	-	Peningkatan Pelayanan			1.100.000.000	DINAS KESEHATAN



								yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting					
	1	0 2	0 2		2 . 0 0 2	0 0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99827 Orang	99827 Orang	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting				110.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1	0 2	0 2		2 . 0 0 2	0 0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatk an Pelayanan	17609 Orang	17609 Orang	800.000.000	1.612.880.000	1.612.880.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna				1.880.000.000	DINAS KESEHATA N	



								Kesehatan Sesuai Standar							Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		n Angka Prevalensi Stunting				
	1	0	0		2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2670 Orang	2670 Orang	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3446 Orang	3446 Orang	157.177.800	3.059.888.000	3.059.888.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			3.100.000.000	DINAS KESEHATAN



	1	0	0		2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32946 Orang	32946 Orang	650.000.000	160.000.000	160.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			720.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	131.770.000	131.770.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			310.000.000	DINAS KESEHATAN



	1	0	0		2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
		2	2		0	1		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	-	-	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			-	DINAS KESEHATA N
	1	0	0		2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
		2	2		0	1		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	33.984.197.518	3.480.010.000	2.689.165.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			29.000.000.000	DINAS KESEHATA N

62

63



								dan Tradisional Lainnya												
	1	02	02		2020	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	141.060.000	141.060.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting		250.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2022	021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	130149 Orang	130149 Orang	210.000.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting		-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2022	022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													



								Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2670 0	-	62.700.000	120.471.100	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	650.450.300	5.377.173.000	5.421.792.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan			1.500.000.000	DINAS KESEHATAN



								dan Tidak Menular								Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		n Angka Prevalensi Stunting					
	1	02	02		2026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	53.281.040.640	64.575.509.799	96.426.531.380	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting				75.000.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02		2027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgu	4320 Orang	4320 Orang	115.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah				132.250.000	DINAS KESEHATAN		



							naan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah							n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting					
1	0 2	0 2		2 . 0 2 2	0 0 2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratoriu m Rujukan/Na sional yang Didistribusi kan	49 Paket	49 Paket	126.375.000	12.500.000	12.500.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			127.765.000	DINAS KESEHATA N		
1	0 2	0 2		2 . 0 2 2	0 0 2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Kabupaten/ Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	259.875.300	200.000.000	200.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka			270.000.000	DINAS KESEHATA N		

68

69



								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17 Unit	4 Unit	250.000.000	163.900.000	163.900.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			253.832.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	262.500.000	76.360.000	76.360.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			275.625.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	456.750.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Pelayanan			-	DINAS KESEHATAN



								n Kewaspada an Dini dan Respon Wabah							Kecamata n, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting				
	1	0 2	0 2		2 . 0 3 2	0 0 3 2 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
								Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penangana n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 Unit	4 Unit	4.922.750.000	3.800.000.000	3.800.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			4.996.591.250	DINAS KESEHATA N	
	1	0 2	0 2		2 . 0 4 2	0 0 4 2 0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosi	340 Orang	340 Orang	51.540.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua	Dana Transfer Umum- Dana	-	Peningka tan Pelayana n			100.000.000	DINAS KESEHATA N	



								s yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar						Kecamata n, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting					
1	0 2	0 2		2 . 0 4 2	0 0 4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	320 Orang	320 Orang	100.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			150.000.000	DINAS KESEHATA N		
1	0 2	0 2		2 . 0 4 2	0 0 4 2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatk an pelayanan kesehatan malaria	3700 Orang	3700 Orang	52.031.200	199.760.000	199.760.000	Kab. Tasikmala ya, Tanjungja ya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			140.000.000	DINAS KESEHATA N		



	1	0	0		2	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
		2	2			0			-	0 0	-	268.845.000	268.845.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting		-	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0		2	0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	623.495.500	50.000.000	50.000.000			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	2 Dokumen	650.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0		2	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	623.495.500	50.000.000	50.000.000	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan			650.000.000	DINAS KESEHATAN

74

75



								Kelola Sesuai Standar													
	1	02	02		204	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	40 Unit	315.000.000	86.100.000	86.100.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			90.750.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		204	004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
								Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	248.750.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN
10	1	02		03			PROGRAM PENINGKATAN	Rasio Tenaga Medis per	0,13 Rasio	0,13 Rasio	1.297.641.200	2.792.660.900	2.792.660.900						0,13 Rasio	1.675.875.851	



						KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	satuan penduduk													
	1	02	03		2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase ijin praktek tenaga kesehatan yang di keluarkan	100,00%	100,00%	462.000.000	-	-			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	100,00 %	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	03		2.000.0012	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	462.000.000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03		2.02	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah 9 jenis ketenagaa	40 Fasyankes	40 Fasyankes	308.787.500	242.655.000	242.655.000			-	Peningkatan Pelayanan	-	40 Fasyankes	152.000.000	DINAS KESEHATAN



							dan Pendayagun aan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	n sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan								n Kesehata n Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting					
	1	0 2	0 3		2 . 0 0 2 1	0	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaa n dan Distribusi serta Pemerataa n Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000	-	-	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			-	DINAS KESEHATA N
	1	0 2	0 3		2 . 0 0 2 2	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di	35 Orang	35 Orang	205.287.500	-	-	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna			-	DINAS KESEHATA N

79



						03	01															
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	210 Orang	210 Orang	526.853.700	2.550.005.900	2.550.005.900	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			1.523.875.851	DINAS KESEHATAN
11	1	02			04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	100,00%	100,00%	1.547.460.454	503.831.000	503.831.000						100,00 %	1.106.827.900	
	1	02	04		2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Kefamasi-an (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)), yang mendapatkan pembinaan	17 Sarana Kefarmasian	17 Sarana Kefarmasian	582.012.500	86.730.000	86.730.000			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	17 Sarana Kefarmasian	600.000.000	DINAS KESEHATAN

81



							tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	rangka pengawasa n produksi dan peredaran PKRT								Prevalen si Stunting					
	1	02	04		200021	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga															
							Jumlah Dokumen Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	382.500.000	-	-	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			-		DINAS KESEHATA N
	1	02	04		203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan	Persentase Industri Pangan Skala	100%	100%	160.250.000	235.062.000	235.062.000			-	Peningka tan Pelayana n	-	100%	376.025.000	DINAS KESEHAT AN	



							Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga terdaftar yang mengikuti pelatihan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)								Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting					
	1	02	04		203	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai	1 Dokumen	1 Dokumen	160.250.000	235.062.000	235.062.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			376.025.000	DINAS KESEHATAN



							Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
	1	0 2	0 4		2.0 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Rest oran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah pelaku usaha penerima sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) tempat pengelolaa n makanan (TPM)	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	104.040.000	-	-			-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting	-	5 Pelak u Usaha	-	DINAS KESEHAT AN
	1	0 2	0 4		2 . 0 0 4 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Pengawasa n serta	1 Dokumen	1 Dokumen	104.040.000	-	-	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta			-	DINAS KESEHATA N	



							Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Res toran dan Depot Air Minum (DAM)								Penuruna n Angka Prevalens i Stunting					
	1	02	04		2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah penjual makanan jajanan, Sentra Makanan jajanan dan pelaku usaha makanan minuman yang mendapatk an pembinaan	70 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	192.886.054	-	-			-	Peningka tan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurun an Angka Prevalen si Stunting	-	70 Pela ku Usaha	-	DINAS KESEHAT AN
	1	02	04		200051	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														



							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	192.886.054	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting		-		DINAS KESEHATAN
	1	02	04		2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga terdaftar yang diperiksa Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman	37.14 %	37.14 %	125.771.900	182.039.000	182.039.000		-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	37.14 %	130.802.900	DINAS KESEHATAN
	1	02	04		20061	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
							Jumlah Produk dan Sarana	26 Unit	108 Unit	125.771.900	182.039.000	182.039.000	Kab. Tasikmalaya,	Dana Transfer Umum-	-	Peningkatan Pelayanan		130.802.900	DINAS KESEHATAN	

87



						0 1	0 1															
									Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000	28.100.000	228.100.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting			330.750.000	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5		2.0 2			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	500.000.000	500.000.000			-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting	-	1 Dokumen	220.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5		2.0 0 0 2 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																
									Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	500.000.000	500.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka			220.000.000	DINAS KESEHATAN

89



							Kabupaten/ Kota														
	1	0 2	0 5		2 . 0 3	0 0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000	619.982.000	619.982.000	Kab. Tasikmala ya, Sukaheni ng, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningka tan Pelayana n Kesehata n Daerah serta Penuruna n Angka Prevalens i Stunting			2.000.000.000	DINAS KESEHATA N



BAB IV **PENUTUP**

Failing to plan is planning to fail, kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sama dengan merencanakan kegagalan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024. Perubahan Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam perubahan rencana kerja dan anggaran (RKAP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, **prosedur standar** pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kesehatan untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran perubahan Renja ini ke dalam RKAP, maka pada saat itu juga harus dilakukan **perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan**. Penjabaran RKAP yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan



lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

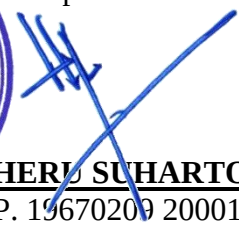
Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan perubahan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Tasikmalaya, 23 Agustus 2024



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya


H. HERI SUHARTO, M.MKes.
NIP. 19670209 200012 1 001